BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016 memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu:

"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016".

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Sulawesi Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Sulawesi Barat

Visi: *"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016*".		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.	Mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan profesional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan produktif.	1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance 2. Optimalisasi perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah, struktur ruang dan pola ruang wilayah 3. Terwujudnya penata laksanaan sistem, prosedur maupun tata kerja birokrasi yang berkualitas 4. Terwujudnya pengelolaan dan

Visi: *"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016*".		
Misi	Tujuan	Sasaran
		penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan 5. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. 6. Meningkatnya kerjasama antar daerah atau lembaga lainnya dalam pembangunan 7. Terwujudnya pelayanan prima yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. 8. Terwujudnya data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
Misi 2 : Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi	Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian	1. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi 2. Terselesaikannya pembangunan bandara Tampa Padang dan sumarorong 3. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik 4. Tersedianya infrastruktur irigasi dan air bersih 5. Tersedianya infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari 6. Terpenuhinya infrastruktur

Visi: *"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016*".		
Misi	Tujuan	Sasaran
		pendidikan, kesehatan dan perumahan 7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar 8. Meningkatnya volume perdagangan 9. Terselenggaranya perhubungan darat dan laut 10. Meningkatnya nilai tukar petani 11. Meningkatnya nilai tukar nelayan 12. Meningkatnya keberdayaan pelaku UMKM. 13. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional
Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup	Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak 2. Menurunnya persentase penduduk miskin 3. Menurunnya persentase pengangguran 4. Mewujudkan Pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera 5. Mewujudkan pengarustamaan gender,perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS 6. Peningkatan Taraf Hidup

Visi: *"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016*".		
Misi	Tujuan	Sasaran
		Transmigran
Misi 4 : Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang utuh dan terpadu dan kualitas SDM yang berdaya saing, berahlak mulia dengan memperhatikan kesetaraan gender dan nilai budaya serta kesejahteraan rakyat	1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini 2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun 3. Terwujudnya pemberantasan buta aksara 4. Meningkatnya minat baca masyarakat 5. Terwujudnya pembangunan Universitas Sulawesi Barat 6. Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni 7. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya budaya
Misi 5 : Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang	Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Pemanfaatan potensi tambang dengan memperhatikan kondisi lingkungan 2. Terselenggaranya percepatan eksplorasi minyak dan gas 3. Pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan 4. Berkurangnya luas lahan kritis 5. Penerapan tata ruang wilayah

Visi: *"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016*".		
Misi	Tujuan	Sasaran
berkelanjutan.		yang berkelanjutan 6. Rendahnya tingkat pencemaran dan resiko bencana; 7. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana 8. Pengembangan Kawasan Konservasi DAS

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah 2014 - 2034

Menindaklanjuti kebijakan dan strategi yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034, yaitu :

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai.

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :
   - peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis keunggulan lokal yang merata, hierarkis dan sinergis; serta
   - peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.

   a. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi :
      1) Mempromosikan Pusat Kegiatan Nasional (PKNp) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampapadang – Belang-Belang (MATABE) yang potensil berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan dan peti kemas,

Pusat-pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (Ibukota Kabupaten Majene) sebagai kota pendidikan, Pasangkayu (Ibukota Kabupaten Mamuju Utara) dan mempromosikan Polewali (Ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensil dikembangkan menjadi agropolitan dan Mamasa (Ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai pusat pariwisata budaya dan alam, Pusat-pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi, Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah dan pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras;

2) Menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
3) Meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antara PKNp, PKW, PKWp dan PKL;
4) Meningkatkan sinergitas antar kawasan perkotaan baik PKNp MATABE, PKW meliputi Majene, Pasangkayu, PKWp yang meliputi Polewali dan Mamasa, PKL yang meliputi Tobadak dan Wonomulyo;
5) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
6) Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis; dan
7) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih *livable* untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, termasuk PKNp, PKWp dan PKL.

b. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi :

1) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda, baik darat, laut maupun udara;
2) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolasi;
3) Meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

4) Meningkatkan sumber daya energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan;
5) Meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
6) Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dengan jaringan dalam tataran Nasional secara optimal.

2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :
   - Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
   - Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
   - Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

   a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung di atas meliputi :
      1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (*ecoregion*) termasuk ekohidrolika DAS; dan
      2) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan.
         a) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah meliputi :
            - Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi;
            - Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30 persen dari luas pulau. Luas dan sebaran kawasan berfungsi lindung perlu disesuaikan dengan keberadaan, karakteristik dan kondisi ekosistem DAS di pulau tersebut; dan
            - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah khususnya DAS kritis.
         b) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah meliputi :
            - Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;

- Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan penerasi masa kini dan generasi masa depan;
- Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan;
- Mengelola sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
2) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a) Strategi untuk perwujudkan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi :

- Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

- Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
- Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan provinsi sebagai pendukung fungsi Sulawesi Barat sebagai lahan pangan berkelanjutan;
- Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
- Mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia atau landasan kontinental untuk meningkatkan perekonomian nasional;

b) Strategi untuk mengendalikan perkembangkan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :

- Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap risiko bencana alam;
- Menumbuh kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan;

- Mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS);
- Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
- Mengembangkan kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat meliputi beberapa sudut kepentingan sebagai berikut :

1) Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
   - mengembangkan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, serta agro industri dan agribisnis;
   - Membangun prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif;
   - Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bermitra sejajar dalam perekonomian nasional atau internasional;
   - Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
   - Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
   - Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
   - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi :
   - mengembangkan kawasan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya;
   - mengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya
3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi :
   - budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan
   - mengembangkan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis.
4) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Barat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
   - melestarikan ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung;
   - menata ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.

   a) strategis pengembangan kawasan kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktifitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, agroindustri dan agrobisnis meliputi :
      - mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional;
      - mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
      - menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
      - mengembangkan kawasan pertanian berkelanjutan berupa sawah irigasi teknis di Kabupaten Mamuju Utara, sawah irigasi teknis di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah terutama di KTM

Tobadak, Kabupaten Polewali Mandar yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS terutama S. Kaluku, S. Karosa, S. Budong-Budong, S. Karama, S. Babalang, S. Tomo dan S. Lariang untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju, serta S. Sa'dang, S. Maloso, S. Mandar dan S. Mapili untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

- Pengembangan kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju, perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat, perkebunan jeruk limau china di Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju Tengah, perkebunan kelapa dalam di sepanjang pesisir Selat Makassar kecuali kawasan perkotaan, perkebunan kopi, teh dan hortikulura di Kabupaten Mamasa;
- Mengembangkan kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan Belang-belang sebagai outlet dan pintu masuk komoditi dari dan ke seluruh wilayah Sulbar serta wilayah perbatasan provinsi tetangga.

b) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif meliputi :

- meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra-sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra-sentra produksi;
- mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan;
- mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu – hilir.

c) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya provinsi terkait pengembangan kawasan pendidikan dan pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan meliputi :

- Kawasan wisata sosial budaya dan alam di Mamasa yang dipadu-selaraskan dengan rute wisatawan mancanegara dan nasional

Bandara Tampapadang ke Mamasa dan Tana Toraja atau sebaliknya;

- Kegiatan wisata Budaya Mandar dapat dikembangkan di kawasan wisata di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju, Majene dan Polman. Pusat wisata budaya mandar yang mempertunjukkan musik, lagu dan tarian tradional mandar, menyajikan makanan dan minuman tradional mandar, juga sarung tenun tradisional mandar, ditempatkan pada jalur wisatawan Mamuju-Mamasa-Toraja. Pengembangan wisata rohani berupa mesjid Mallapeo di Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengembangkan kota pendidikan Majene.

d) Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi :

- mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti: jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi;
- mengembangkan kampus-kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama

e) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi provinsi meliputi :

- mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
- meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
- mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

f) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) meliputi :

- Blok minyak Suremana, Pasangkayu dan Kuma di Kabupaten Mamuju Utara, blok minyak Karama dan Budong-budong di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah, blok minyak Malunda dan blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Majene, blok minyak

Sibuku di Pulau Lere-lerekang di Kabupaten Majene, blok minyak Shout Mandar dan blok Mandar di Kabupaten-kabupaten Majene dan Polman;

- PLTU Mamuju di Kalukku;
- PLTA Karama di Mamuju;
- PLT Hydrogen di Mamuju;
- KSP Bendungan-bendungan yang terdiri atas Bendungan Sekka-sekka di Kabupaten Polman dan Bendungan Tommo di Kabupaten Mamuju.

g) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi meliputi :

- menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
- mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
- mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional maupun provinsi.

h) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi meliputi mengembangkan :

- Suaka Margasatwa Mampie dan Lampoko di Kabupaten Polewali Mandar;
- Suaka Margasarwa Kalumpang di Kabupaten Mamuju;
- Taman Nasional Ganda Dewata di Kabupaten Mamuju dan Mamasa;
- Kawasan perlindungan laut di sekitar P. Lumu-lumu dan P. Lere-lerekang.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan di daerah harus mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang meliputi : pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs).

Untuk program pro rakyat, memfokuskan kepada: (a) program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (b) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (c) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Program keadilan untuk semua (*Justice For All*), memfokuskan kepada : (a) program keadilan bagi anak; (b) program keadilan bagi perempuan; (c) program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (d) program keadilan di bidang bantuan hukum; (e) program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan (f) program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs),memfokuskan pada : (a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, (b) program pencapaian pendidikan dasar untuk semua, (c) program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (d) program penurunan angka kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; (h) program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium melalui pengembangan kemitraan untuk pembangunan.

Arah kebijakan percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals*, meliputi :

1. Pemberantasan Kemiskinan;
2. Pendidikan dasar untuk semua;
3. Pencapaian kesetaraan gender;
4. Penurunan angka kematian ibu dan anak/bayi;
5. Penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
6. Pencegahan dan pengobatan penyakit menular.

4.2 Prioritas dan Pembangunan

Pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 – 2016, memfokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agroindustri, destinasi wisata, ketahanan pangan dan konektivitas wilayah, untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016, untuk itu dipilih berdasarkan Isu Strategis, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang mendukung dari fokus tersebut sesuai dengan yang tertuang didalam RPJMD, yaitu :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan disetiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Masih tingginya Angka Kematian bayi dan Ibu;
3. Penanggulangan Penduduk Miskin;
4. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
5. Cakupan dan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih;
6. Pengembangan Kawasan Strategis dan Destinasi Wisata Sulawesi Barat;
7. Penguatan Ketahanan Pangan, Agroindustri dan Daya Saing;
8. Penguatan Profesionalisme SDM Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
10. Ganguan keamanan dari dalam dan luar negeri.

Berpedoman pada isu strategis diatas dan memperhatikan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang didalam dokumen perencanaan lima tahunan maka untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah tahun 2016, startegi dan arah kebijakan di fokuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah

Fokus misi ini adalah dengan melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan visi yang diemban SKPD.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah :

1. Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas;
2. Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal dan profesional;
3. Mewujudkan struktur kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah daerah yang berkualitas;
4. Mewujudkan budaya tata kerja aparatur Pemerintah yang profesional dan cerdas;
5. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja;
6. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pembangunan;

7. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan daerah dan stakeholder lainnya;
8. Meningkatnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga domestik dan internasional utnk mendorong penanaman modal investasi keuangan, perkembangan ekonomi dan sektor-sektor lainnya;
9. Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur Pemerintah;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
11. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah :

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pada setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance;
2. Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Peningkatan pengendalian terhadap hasil-hasil monitoring dan evalauasi untuk menjamin tepat sasarnnya program-program pembangunan;
5. Adanya standar operating prosedur bagi pelaksanaan tupoksi aparatur;
6. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggung jawaban perhitungan APBDmenuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP);
7. Optimalisasi akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan;Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum aparatur;
8. Kerjasama pembangunan antar provinsi dan kabupaten, serta provinsi lain yang saling menguntungkan;
9. Pembangunan komunikasi timbal balikPemerintah dan Stakeholder;
10. Meningkatkan promosi keunggulan komparatif, wilayah dan sumber daya alam;
11. Promosi tentang peluang, insentif dan profit dalam menanamkan modal di Sulawesi Barat;
12. Optimalisasi penyelenggaraan pelayananpublik;
13. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana kerja;
14. Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pembangunan daerah;
15. Perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

Misi 2 : Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi.

Fokus misi ini dengan melaksanakan pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah :

1. Meningkatkan pembangunan jaringan jalandan jembatan pada semua wilayah;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan ke pusat-pusat produksi;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan energi dan ketenaga listrikan;
4. Mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan air bersih;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan disemua wilayah;
8. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
9. Meningkatkan pemerataan pelayanan transportasi antar wilayah, baik antar provinsi maupun kabupaten;
10. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas sesuai standar pelayanan;
11. Meningkatkan volume perdagangan dengan kemudahan perijinan dan jaminan kondisi wilayah yang kondusif;
12. Meningkatkan jaringan perhubungan jalur darat dan laut;
13. Meningkatkan nilai tukar petani dengan tetap menjaga kualitas panen dan kondisi pasar;
14. Meningkatkan nilai tukar nelayandengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas tangkapan dan kondisi pasar;
15. Pemberdayaan pelaku UMKM;
16. Pengembangan dan promosi destinasi wisata.

Arah kebijakan pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah :

1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan untuk peningkatan interkoneksi wilayah;
2. Peningkatan akses jalan dan jembatan untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan;
3. Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;

4. Pengembangan potensienergi baru dan terbarukan;
5. Pemantapan kondisi jaringan irigasi dan air bersih guna meningkatan aktivitas ekonomi;
6. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya;
7. Pengembangan dan pemantapan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari;
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan mengantisipasi adanya lonjakan peserta didik akibat kebijakan wajar 9 tahun dan wajar 12 tahun;
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan di Mamuju sebagai pusat ibukota dan daerah lainnya;
10. Meningkatkan pembangunan perumahan yang murah, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat;
11. Prioritas pembangunan infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
12. Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
13. Pengembangan infrastruktur transportasi perhubungan sesuai standar pelayanan;
14. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap member ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi;
15. Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi;
16. Peningkatan akses jalur darat dan laut untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat;
17. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian perikanan dan ternak serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan;
18. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat;
19. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan;
20. Peningkatan kemampuan nelayan dan penguatan lembaga pendukunganya dan peningkatan produktivitas;

21. Pengembangan sarana prasarana pendukung nelayan;
22. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga;
23. Pembangunan infrastruktur kepariwisataan;
24. Pengembangan Promosi dan pemasaran aset wisata;
25. Pengembangan potensi wisata alam dan budaya.

Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup.

Fokus misi adalah upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
2. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi pro poor melalui pemberdayaan masyarakat (Program Bangun Mandar);
3. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perlindungan sosial;
4. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin;
5. Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarak miskin;
6. Menurunkan persentase pengangguran dengan strategi pro job melalui pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya;
7. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera;
8. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah;
9. Pengarustamaan gender dalam pembangunan;
10. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan;
11. Meningkatkan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
12. Pengembangan wilayah dan pemukiman transmigrasi

Arah kebijakan Pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis dan paramedis;
2. Peningkatan kualitas status kesehatan masyarakat;
3. Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat;
4. Peningkatan Pelayanan kesehatan pada Unit-Unit Pelayanan kesehatan;

5. Peningkatan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin;
6. Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengakses segala sumber kehidupan yang layak;
7. Dukungan terhadap pelaksanaan MP3KI;
8. Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin;
9. Pemberian jaminan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan aksesibiltas terhadap pelayanan kesehatan,pendidikan dan lainnya;
10. Dukungan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan;
11. Pemberian Modal usaha dan modal kerja bagi keluarga miskin;
12. Perluasan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin;
13. Pemberian kemudahan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha;
14. Pemberian bantuan rumah layak huni, angkutan murah, air bersih dan sanitasi yang layak, listrik murah dan hemat,kehidupan masyarakat miskin perkotaan;
15. Peningkatan kehidupan nelayan;
16. Menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan kegiatan padat karya;
17. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja;
18. Pengembangan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
19. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat;
20. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
21. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
22. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
23. Peningkatan kelembagaan dan koordinasi perlindungan anak dan perempuan;
24. Penetapan regulasi daerah tentang perlindungan anak dan perempuan;
25. Penyusunan dokumen analisis situasi ibu dan anak;
26. Dukungan terhadap pelaksanaan wilayah layak anak;
27. Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
28. Peningkaatan perlindungan dan jaminan sosial;
29. Pengembangan kesejahteraan sosial dan kapasirtas SDM;
30. Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
31. Pengembangan Transmigrasi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Fokus misi ini adalah pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreativitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah :

1. Mewujudkan pendidikan anak usia pra sekolah;
2. Mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun dan 12 tahun;
3. Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat terhadap pendidikan;
4. Meningkatkan penuntasan buta aksara;
5. Penyediaan bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat;
6. Meningkatkan peran dan prestasi pemuda dalam pembangunan daerah;
7. Meningkatkan prestasi olahraga dan seni;
8. Pengembangan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal;
9. Percepatan pembangunan Universitas Sulawesi Barat.

Arah kebijakan Pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah :

1. Meningkatkan akses dan pelayanan masyrakat terhadap pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan akses dan mutu pelyanan pendidikan dasar 9 tahun;
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar 12 tahun;
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas;
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Peningkatan kemampuan dan budayabaca masyarakan dengan tersedianyabuku-buku yang berkualitas;
7. Perwujudan status PTN untuk Universitas Sulawesi Barat;
8. Dukungan pendanaan terhadap pengembangan perguruan tinggi negeri;
9. Peningkatan Kualitas Kepemudaan;
10. Peningkatan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan;

11. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam pembangunan;
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas prestasi olahraga dan seni secara berkelanjutan;
13. Peningkatan upaya revitalisasi dan pengelolaan aset sumberdaya budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Sulawesi Barat;
14. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya pada perilaku kehidupan masyarakat;
15. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah;
16. Peningkatan apresiasi pemerintah, masyarakat dan swasta terhadap seni dan budaya lokal.

Misi 5 : Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan penerapan kebijakan tersebut akan menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Fokus misi ini adalah pada upaya melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga aspek keberlanjutan tetap dapat terjaga demi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah :

1. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan;
2. Terfasilitasinya percepatan eksplorasi minyak dan gas oleh pihak swasta;
3. Mengembangkan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengamanan hutan oleh provinsi dan kab;
5. Mengembangkan penataan ruang yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana dan KesiapsiagaanBencana;
7. Meningkatkan penanganan mitigasi bencana;
8. Meningkatkan penanganan masalah strategis tanggap darurat;
9. Meningkatkan penanggulangan pasca bencana;
10. Meningkatkan pengembangan konservasi di kawasan DAS

Arah kebijakan Pembangunan untuk menjalankan strategi ini adalah :

1. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;

2. Peningkatan peluang usaha pertambangan;
3. Daya dukung investor dalam eksplorasi minya dan gas;
4. Peningkatan pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan dan pengelolaan lingkungan laut berbasis masyarakat;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya kelautan;
6. Rehabilitasi, penghijauan dan reklamasi hutan dan lahan;
7. Pemantapan Kawasan Hutan;
8. Perlindungan Hutan dan konservasi sumberdaya Alam;
9. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan;
10. Peningkatan koordinasi pengamanan hutan;
11. Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya;
12. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;
13. Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung;
14. Peningkatan kesadaran masyarakat diwilayah-wilayah rawan bencana;
15. Pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana;
16. Pemetaan wilayah rawan bencana;
17. Pengembangan kelembagaan penanganan korban bencana;
18. Meningkatkan penanganan Kedaruratan Korban Bencana di wilayah secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir dan terpadu;
19. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara terpadu;
20. Restrukturisasi, rekonstruksi dan revitalisasi infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana;
21. Peningkatan kontrol di kawasan DAS.

Tabel 4.2.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan berdasarkan RPJMD

Misi 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.
Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan profesional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan produktif.

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip *Good Governance*;	1 Terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas.	1 Peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pada setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and g*ood governance*;
		2 Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
2 Optimalisasi perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah, struktur ruang dan pola ruang wilayah	2 Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal dan profesional	3 Perwujudan sinergi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang handal;
		4 Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
		5 Peningktan pengendalian terhadap hasil-hasil monitoring dan evalauasi untuk menjamin tepat sasarnnya program-program pembangunan
3 Terwujudnya penata laksanaan sistem, prosedur maupun tata kerja birokrasi yang berkualitas	3 Mewujudkan struktur kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	6 Penataan organisasi dan ketata laksanakan pemerintah

Misi 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.					
Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan profesional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan produktif.					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
		4	Mewujudkan budaya tata kerja aparatur Pemerintah yang profesional dan cerdas;	7	Adanya standar operating prosedur bagi pelaksanaan tupoksi aparatur
4	Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	5	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis kinerja.	8	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggung jawaban perhitungan APBDmenuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP);
				9	Optimalisasi akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan;
5	Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum.	6	Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pembangunan;	10	Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum aparatur.
6	Meningkatnya kerjasama antar daerah atau lembaga lainnya dalam pembangunan	7	Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan daerah dan stakeholder lainnya	11	Kerjasama pembangunan antar provinsi dan kabupaten, serta provinsi lain yang saling menguntungkan;
				12	Pembangunan komunikasi timbal

Misi 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.				
Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan profesional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan produktif.				
Sasaran		Strategi		Kebijakan
				balikPemerintah dan Stakeholder;
		8 Meningkatnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga domestik dan internasional utnk mendorong penanaman modal investasi keuangan, perkembangan ekonomi dan sektor-sektor lainnya	13	Meningkatkan promosi keunggulan komparatif, wilayah dan sumber daya alam
			14	Promosi tentang peluang, insentif dan profit dalam menanamkan modal disulawesi barat
7	Terwujudnya pelayanan prima yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.	9 Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur Pemerintah;	15	Optimalisasi penyelenggaraan pelayananpublik;
		10 Meningkatkan sarana dan prasarana kerja;	16	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana kerja
8	Terwujudnya data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi	11 Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi	17	Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pembangunan daerah;
			18	Perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi

Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi					
Tujuan: Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi	1	Meningkatkan pembangunan jaringan jalandan jembatan pada semua wilayah	1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan untuk peningkatan interkoneksi wilayah
		2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan ke pusat-pusat produksi	2	Peningkatan akses jalan dan jembatan untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan;
2	Terselesaikannya pembangunan bandara Tampa Padang dan sumarorong	3	Percepatan pembangunan bandar udara Tampa Padang dan sumarorong	3	Peningkatan pembangunan bandara Tampa Padang dan Sumarorong
3	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik	4	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan energi dan ketenaga listrikan;	4	Peningkatan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
		5	Mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan	5	Pengembangan potensienergi baru dan terbarukan;

Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi					
Tujuan: Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
4	Tersedianya infrastruktur irigasi dan air bersih	6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi dan air bersih	6	Pemantapan kondisi jaringan irigasi dan air bersih guna meningkatan aktivitas ekonomi;
				7	Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya;
5	Tersedianya infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari	7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari	8	Pengembangan dan pemantapan infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari
6	Terpenuhinya infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan	8	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan disemua wilayah	9	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan mengantisipasi adanya lonjakan peserta didik akibat kebijakan wajar 9 tahun dan wajar 12 tahun
				10	Meningkatkan pembangunan infrastruktur kesehatan di Mamuju sebagai pusat ibukota dan daerah lainnya
				11	Meningkatkan pembangunan perumahan yang murah,

Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi					
Tujuan: Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
					berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	9	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;	12	Prioritas pembangunan infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		10	Meningkatkan pemerataan pelayanan transportasi antar wilayah, baik antar provinsi maupun kabupaten;	13	Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
		11	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas sesuai standar pelayanan;	14	Pengembangan infrastruktur transportasi perhubungan sesuai standar pelayanan
8	Meningkatnya volume perdagangan	12	Meningkatkan volume perdagangan dengan kemudahan perijinan dan jaminan kondisi wilayah yang kondusif	15	Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap member ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi

Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi					
Tujuan: Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
				16	Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi
9	Terselenggaranya perhubungan darat dan laut	13	Meningkatkan jaringan perhubungan jalur darat dan laut	17	Peningkatan akses jalur darat dan laut untuk usaha produktif bagi peningkatan perekonomian masyarakat
10	Meningkatnya nilai tukar petani	14	Meningkatkan nilai tukar petani dengan tetap menjaga kualitas panen dan kondisi pasar	18	Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian perikanan dan ternak serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
				19	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat
				20	Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan

Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi					
Tujuan: Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
11	Meningkatnya nilai tukar nelayan	15	Meningkatkan nilai tukar nelayandengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas tangkapan dan kondisi pasar	21	Peningkatan kemampuan nelayan dan penguatan lembaga pendukunganya dan peningkatan produktivitas.
				22	Pengembangan sarana prasarana pendukung nelayan
12	Meningkatnya keberdayaan pelaku UMKM.	16	Pemberdayaan pelaku UMKM	23	Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga
13	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional	17	Pengembangan dan promosi destinasi wisata	24	Pembangunan infrastruktur kepariwisataan
				25	Pengembangan Promosi dan pemasaran aset wisata
				26	Pengembangan potensi wisata alam dan budaya

Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup					
Tujuan: Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak	1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis dan paramedis
				2	Peningkatan kualitas status kesehatan

Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup					
Tujuan: Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
					masyarakat;
				3	Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat;
				4	Peningkatan Pelayanan kesehatan pada Unit-Unit Pelayanan kesehatan;
2	Menurunnya persentase penduduk miskin	2	Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi pro poor melalui pemberdayaan masyarakat (Program Bangun Mandar)	5	Peningkatan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
				6	Pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengakses segala sumber kehidupan yang layak
				7	Dukungan terhadap pelaksanaan MP3KI
		3	Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perlindungan sosial	8	Pemberian bantuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin
				9	Pemberian jaminan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan aksesibiltas terhadap pelayanan kesehatan,pendidikan dan lainnya.
				10	Dukungan terhadap

Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup				
Tujuan: Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup				
Sasaran	Strategi		Kebijakan	
				pelaksanaan program keluarga harapan
	4	Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin	11	Pemberian Modal usaha dan modal kerja bagi keluarga miskin
			12	Perluasan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin
			13	Pemberian kemudahan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha
	5	Menurunkan persentase penduduk miskin dengan strategi peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarak miskin	14	Pemberian bantuan rumah layak huni, angkutan murah, air bersih dan sanitasi yang layak, listrik murah dan hemat,kehidupan masyarakat miskin perkotaan
			15	Peningkatan kehidupan nelayan

Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup					
Tujuan: Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
3	Menurunnya persentase pengangguran	6	Menurunkan persentase pengangguran dengan strategi pro job melalui pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya	16	Menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan kegiatan padat karya
				17	Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja
				18	Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja
				19	Pembangunan Balai Latihan Kerja bertaraf international
4	Mewujudkan Pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera	7	Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera	20	Pembangunan berwawasan kependudukan berkelanjutan
				21	Pengembangan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup					
Tujuan: Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
5	Mewujudkan pengarustamaan gender,perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS	8	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah	22	Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dengan ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat
				23	Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
				24	Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
		9	Pengarustamaan gender dalam pembangunan	25	Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
		10	Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan	26	Peningkatan kelembagaan dan koordinasi perlindungan anak dan perempuan
				27	Penetapan regulasi daerah tentang perlindungan anak dan perempuan

Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup					
Tujuan: Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan dan kualitas hidup					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
				28	Penyusunan dokumen analisis situasi ibu dan anak
				29	Dukungan terhadap pelaksanaan wilayah layak anak
		11	Meningkatkan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	30	Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
				31	Peningkaatan perlindungan dan jaminan sosial
				32	Pengembangan kesejahteraan sosial dan kapasirtas SDM
6	Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	12	Pengembangan wilayah dan pemukiman transmigrasi	33	Pengembangan Wilayah Transmigrasi
				34	Pengembangan Transmigrasi Lokal

Misi 4: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan		
Tujuan: Mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang utuh dan terpadu dan kualitas SDM yang berdaya saing, berahlak mulia dengan memperhatikan kesetaraan gender dan nilai budaya serta kesejahteraan rakyat		
Sasaran	Strategi	Kebijakan

Misi 4: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan					
Tujuan: Mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang utuh dan terpadu dan kualitas SDM yang berdaya saing, berahlak mulia dengan memperhatikan kesetaraan gender dan nilai budaya serta kesejahteraan rakyat					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini	1	Mewujudkan pendidikan anak usia pra sekolah	1	Meningkatkan akses dan pelayanan masyrakat terhadap pendidikan anak usia dini
2	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	2	Mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun dan 12 tahun	2	Meningkatkan akses dan mutu pelyanan pendidikan dasar 9 tahun
				3	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar 12 tahun
		3	Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat terhadap pendidikan	4	Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas
				5	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

Misi 4: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan					
Tujuan: Mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang utuh dan terpadu dan kualitas SDM yang berdaya saing, berahlak mulia dengan memperhatikan kesetaraan gender dan nilai budaya serta kesejahteraan rakyat					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
					kependidikan;
				6	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
3	Terwujudnya pemberantasan buta aksara;	4	Meningkatkan penuntasan buta aksara	7	Membuka akses pendidikan informal maupun non formal yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui program tuntas kecamatan
4	Meningkatnya minat baca masyarakat	5	Penyediaan bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat	8	Peningkatan kemampuan dan budayabaca masyarakan dengan tersedianyabuku-buku yang berkualitas;
				9	Pembangunan perpustakaan daerah sampai tingkat desa
5	Terwujudnya pembangunan Universitas Sulawesi Barat	6	Percepatan pembangunan Universitas Sulawesi Barat;	10	Perwujudan status PTN untuk Universitas Sulawesi Barat
				11	Dukungan pendanaan terhadap pengembangan perguruan tinggi negeri
6	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni	7	Meningkatkan peran dan prestasi pemuda dalam	12	Peningkatan Kualitas Kepemudaan
				13	Peningkatan sarana dan

Misi 4: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan					
Tujuan: Mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang utuh dan terpadu dan kualitas SDM yang berdaya saing, berahlak mulia dengan memperhatikan kesetaraan gender dan nilai budaya serta kesejahteraan rakyat					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
			pembangunan daerah.		prasarana aktivitas kepemudaan
				14	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam pembangunan;
		8	Meningkatkan prestasi olahraga dan seni	15	Peningkatan kuantitas dan kualitas prestasi olahraga dan seni secara berkelanjutan;
7	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya budaya	9	Pengembangan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal	16	Peningkatan upaya revitalisasi dan pengelolaan aset sumberdaya budaya dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Sulawesi Barat
				17	Penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya pada perilaku kehidupan masyarakat
				18	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah
				19	Peningkatan apresiasi pemerintah, masyarakat dan swasta terhadap seni dan budaya lokal

Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.		
Tujuan: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		
Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Pemanfaatan potensi tambang dengan memperhatikan kondisi lingkungan	1 Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan	1 Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
	2 Membangun komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan;	2 Peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber dayaalam dan lingkungan hidup;
		3 Peningkatan peluang usaha pertambangan;
2 Terselenggaranya percepatan eksplorasi minyak dan gas	3 Terfasilitasinya percepatan eksplorasi minyak dan gas oleh pihak swasta	4 Daya dukung investor dalam eksplorasi minya dan gas
3 Pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan	4 Mengembangkan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan;	5 Peningkatan pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan dan pengelolaan lingkungan laut berbasis masyarakat;
		6 Pemberdayaan masyarakat dalam

Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.					
Tujuan: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
					pengawasan dan pengendalian Sumber Daya kelautan;
4	Berkurangnya luas lahan kritis	5	Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan dengan melakukan penyediaan bibit tanaman kehutanandan MPTS untuk penghijauan, rehabilitasi dan reklamasi lahan;	7	Rehabilitasi, penghijauan dan reklamasi hutan dan lahan;
				8	Pemantapan Kawasan Hutan;
				9	Perlindungan Hutan dan konservasi sumberdaya Alam;
				10	Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan
		6	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengamanan hutan oleh provinsi dan kab;	11	Peningkatan koordinasi pengamanan hutan
5	Penerapan tata ruang wilayah yang berkelanjutan	7	Mengembangkan penataan ruang yang berkelanjutan	12	Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab

Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.					
Tujuan: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
					pengelolaan hutan serta penetapan kawasan hutan pada penataan ruang wilayah sesuai dengan peran dan fungsinya
6	Rendahnya tingkat pencemaran dan resiko bencana;	8	Meningkatkan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana dan KesiapsiagaanBencana;	13	Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana
				14	Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
		9	Meningkatkan penanganan mitigasi bencana;	15	Peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program konservasi untuk mencapai kemantapan pengelolaan hutan konservasi dan

Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.		
Tujuan: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		
Sasaran	Strategi	Kebijakan
		hutan lindung
		16 Peningkatan kesadaran masyarakat diwilayah-wilayah rawan bencana
		17 Pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana
		18 Pemetaan wilayah rawan bencana
7 Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;	10 Meningkatkan penanganan masalah strategis tanggap darurat;	19 Pengembangan SOP penanganan tanggap darurat dipahami semua pihak
		20 Pengembangan kelembagaan penanganan korban bencana
		21 Meningkatkan penanganan Kedaruratan Korban Bencana di wilayah secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir dan terpadu;
		22 Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara

Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.					
Tujuan: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
Sasaran		Strategi		Kebijakan	
					terpadu;
		11	Meningkatkan penanggulangan pasca bencana	23	Restrukturisasi, rekonstruksi dan revitalisasi infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana
8	Pengembangan Kawasan Konservasi DAS	12	Meningkatkan pengembangan konservasi di kawasan DAS	24	Peningkatan kontrol di kawasan DAS

Dengan melihat pola hubungan keterkaitan tersebut diatas, maka program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012-2016 jika dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah tahun rencana, akan tampak seperti pada Tabel 4.2.2 berikut ini.

Tabel 4.2.2

Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
A. Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD		
1	Program Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program peningkatan kapasitas	Program Peningkatan Kapasitas

	sumber daya aparatur	Sumber Daya Aparatur
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
B. Program Urusan Wajib		
I.	**Pendidikan**	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3	Program Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah
4	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal
5	Program Pendidikan Luar Biasa	Program Pendidikan Luar Biasa
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Prgram Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
9	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
II.	**Kesehatan**	
10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
15	Program Pencegahan dan	Program Pencegahan dan

	Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan Penyakit Menular
16	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
17	Program Pelayanan Kesehatan Perorangan	Program Pelayanan Kesehatan Perorangan
18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
20	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
21	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
22	Program promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
23	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
24	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
25	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana RS	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
26	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
27	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
III.	**Pekerjaan Umum**	
28	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

29	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
30	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
31	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
32	Program Pengendalian Banjir	Program pengendalian banjir
33	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
34	Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkantoran	Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkantoran
35	Program peningkatan kualitas dan perluasan ketersedian sarana dan prasarana ekonomi	
36	Program peningkatan dan rehabiltasi daerah irigasi	
37	Program pengendalian banjir, angkutan sendimen dan pengamanan pantai	
38	Program pengembangan infrastruktur kawasan	Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan
IV.	**Perumahan**	
39	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan
V.	**Penataan Ruang**	
40	Program Prencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
41	Program Pemanfaatan Ruang	
42	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
VI.	**Perencanaan Pembangunan**	
43	Program Pengembangan Data / Informasi	Program Pengembangan data/informasi

44	Program kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan
45	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
46	Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
47	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah
49	Program perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program perencanaan pembangunan ekonomi
50	Program perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
51	Program Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
52	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
53	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
54	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	
VII.	**Perhubungan**	
55	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
56	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
57	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan

58	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
59	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
60	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
61	Program peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri	
62	Program Peningkatan dan pengawasan usaha jasa pos dantelekomunikasi	Program Peningkatan dan Pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi
63	Program pengendalian dan pengamanan lalulintas	
VIII.	**Lingkungan Hidup**	
64	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
66	Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
67	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
68	Program Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	
69	Program Pengelolaan Ruangan Terbuka Hijau (RTH)	
70	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
IX.	**Pertanahan**	
71	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

	pemanfaatan tanah	pemanfaatan tanah
X.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**	
72	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan
XI.	**Pemberdayaan Perempuan**	
73	Program Pengumpulkan Data dan Informasi	Program Pengumpulan data dan informasi
74	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
75	Program Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
76	Program Peningkatan Peran serta dan kesetraan Gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
77	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA)	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
78	Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas hidup Gender development Indeks (GDI)	
79	Program Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	
XII.	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**	
80	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
81	Program Keluarga Berencana	
82	Program Pembinaan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan KB/KS yang Mandiri	

83	Program Promosi kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan Masyarakat	
84	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	
85	Program Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS	
86	Program pengembangan bahan Imformasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Anak	
87	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina Keluarga (BKB)	
88	Program Pengembangan model oprasional BKB-Posyandu-padu	
89	Program peran serta perempuan dalam pembangunan	
XIII.	**Sosial**	
90	Program Pengembangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Program Pengembangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
91	Program Penanggulangan Kemiskinan	
92	Program Perumahan dan Permukiman Layak Huni	
93	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
94	Program Pemberdayaan Keluarga	Program pemberdayaan keluarga
95	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
96	Program Pelestarian Nilai	Program pelestarian nilai

	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
97	Program Pembinaan anak terlantar	Program pembinaan anak terlantar
98	Proram Pembinaan panti asuhan / jompo	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
99	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
100	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
101	Program Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Penyalahgunaan Napza	
102	Penanggulangan Musibah Bencana Alam/ Bencana Sosial	Program Penanggulangan musibah bencana alam/bencana sosial
103	Program Bantuan Tunai Bersyarat	
104	Program Asuransi Kesejahteraan Sosial	
105	Program Perlindungan bagi Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran	Program Perlindungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran
106	Program Penyelenggaraan Undian	
107	Program Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	
108	Program Keluarga Harapan	
XIV.	**Tenaga Kerja**	
109	program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
110	program peningkatan kesempatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
111	program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

112	program pembinaan pengawasan ketenagakerjaan	Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
XV.	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
113	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
114	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
115	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
116	Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
117	Program pengembangan dan pembinaan Koperasi UKM	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi UKM
118	Program Pemberdayaan koperasi dan UKM	
XVI.	**Penanaman Modal**	
119	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
120	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
121	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
122	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program kualitas pelayanan publik
123	Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis BKPMD & P2T	Program peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis BKPMD & P2T
XVII.	**Kebudayaan**	
124	Program Pengambangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya
125	Program Pengelolaan Kekayaan	

	Budaya	
126	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
XVIII.	**Pemuda dan Olah Raga**	
127	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan
128	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
129	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
130	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
131	Program pelayanan kepemudaan	
XIX.	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	
132	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	
133	Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.	Program penngkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
134	Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.	Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan Ormas
135	Program Pengembangan Wawasaan Kebangsaan.	Program pengembangan wawasan kebangsaan
136	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	
137	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
138	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	
139	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.	
140	Program Fasilitas Politik Dalam Negeri.	Program fasilitas politik dalam negeri

141	Program Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Aparat di Daerah.	
142	Program Antisipasi Cegah Dini Terhadap Perkembangan Konflik di Daerah.	
143	Program peningkatan kesiapsiagaan dan logostik bencana	Program peningkatan kesiapsiagaan dan logistik bencana
144	Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana	Program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
145	Program Pemulihan Pasca Bencana	Program pemulihan pasca bencana
146	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
147	Program pengembangan Wawasan Kebangsaan	
XX.	**Pemerintahan Umum**	
148	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
149	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	
150	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
151	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah
152	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah	
153	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
154	Program Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program pengembangan kapasitasn dan evaluasi kinerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal

155	Program Fasilitasi Pemillihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil kepala Daerah	
156	Program Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	
157	Program fasilitasi kerjasama dengan Pihak Ketiga	
158	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
159	Program Pembinaan Wilayah	
160	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	
161	Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
162	Program pengembangan wilayah Perbatasan	Program pengembangan wilayah perbatasan
163	Program Toponimi dan Pemetaan Wilayah	
164	Program Penetapan Luas Wilayah	
165	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
166	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
167	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
168	Program Penanganan Bantuan Hukum dan HAM	Program Penanganan Bantuan Hukum dan HAM
169	Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

170	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	
171	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
172	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	
173	Program peningkatan komunikasi & Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa
174	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah
175	Program Penguatan Ekonomi Daerah	Program penguatan ekonomi daerah
176	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
177	Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama
178	Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan melalui kelompok kegiatan di masyarakat	
179	Program peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan	Program peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
180	Program pelayanan dan pembinaan sekolah	
181	Peningkatan Kesehatan Aparatur	
182	Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	
183	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
184	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
185	Program peningkatan kualitas kelembagaan pemprov sulbar	Program peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah provinsi

		sulawesi barat
186	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
187	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	
188	Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
189	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
190	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
191	Program Pengintensifan penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
192	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
193	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
194	Program peningkatan pelayanan kehumasan	Program peningkatan pelayanan kehumasan
195	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
196	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	
197	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur (personnel capacity building) pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Program peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
198	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

	kepala daerah	Kepala Daerah
199	Program peningkatan pelayanan kehumasan	
200	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
201	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
202	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan	
203	Program Partisipasi Masyarakat	
XXI.	**Kepegawaian**	
204	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	
205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
206	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
207	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur (*personnel capacity building*) pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	
208	Program pembinaan peningkatan keagamaan	Program Pembinaan peningkatan keagamaan
209	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
XXII.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
210	program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
211	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
212	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

213	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
XXIII.	**Kearsipan**	
214	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
215	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
XXIV.	**Komunikasi dan Informatika**	
216	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
217	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
218	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
219	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa
220	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
221	Penertiban Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	
222	Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi	
223	Sosialisasi Undang-Undang 32 Tahun 2002 ttg Penyiaran dan Peraturan KPI ttg P3-SPS	
224	Pengawasan Isi Siaran Radio & Televisi di Sulawesi Barat	
225	Pengembangan SDM Bidang Penyiaran	
226	Pengembangan Infrastuktur Radio Komunitas	
227	Pengembangan Sarana Televisi Berlangganan	

228	Program pengembangan kelembagaan melalui media komunikasi dan informasi	
229	Program Peningkatan Komunikasi & Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Program peningkatan komunikasi informasi serta penggunaan media mssa
C. Program Urusan Pilihan		
I.	**Pertanian**	
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya SainG, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian	Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian
9	Program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
10	Peningkatan Kesejahteraan Petani	
11	Peningkatan Ketahanan Pangan	
12	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
13	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
14	Program Peningkatan Produksi	

	Pertanian/Perkebunan	
15	Program peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri	
16	Program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
17	Peningkatan Kesejahteraan Petani	
18	Peningkatan Ketahanan Pangan	
19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
II.	**Kehutanan**	
21	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	
22	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
23	Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya Hutan	
24	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
25	Program Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Hutan	
26	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan kawasan Hutan	Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
27	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	Program peningkatan usaha kehutanan
28	Program konservasi keanekaragaman hayati dan Perlindungan Hutan	Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
29	Program Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat

30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat	
III.	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	
31	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
32	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
34	Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral
35	Program Pengembangan dan Monitoring Bidang Minyak dan Gas Bumi	Program Pengembangan dan Monitoring Bidang Minyak dan Gas Bumi
36	Survei dan Pemetaan Sumber Daya Geologi,Tatalingkungan, Mineral dan BatuBara	Survey dan Pemetaan Sumber Daya Geologi, Tata Lingkungan, Mineral dan Batubara
37	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
38	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
IV.	**Pariwisata**	
39	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan
40	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
41	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
V.	**Kelautan dan Perikanan**	
42	Program Pemberdayaan Ekonomi	Program Pemberdayaan Ekonomi

	Masyarakat Pesisir	Masyarakat Pesisir
43	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
44	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	
45	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
46	Program Pengembangan budidaya perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
47	Program pengembangan perikanan tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
48	Program pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	
49	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
50	Program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
VI.	**Perdagangan**	
51	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
52	Program peningkatan kerjasama perdagangan international	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
53	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
54	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
55	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
VII.	**Perindustrian**	
56	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
57	Program pengembangan IKM	Program Pengembangan Industri

		Kecil dan Menengah
58	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
59	Program Penataan Struktur Industri	Program Penataan Struktur Industri
60	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
61	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
VIII.	**Transmigrasi**	
62	program pengembangan wilayah transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
63	program transmigrasi lokal	Program Transmigrasi Lokal

Dari tabel tersebut diatas terkait dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016, setelah dilakukan identifikasi terhadap Program Prioritas berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016, masih terdapat beberapa program yang tidak tercantum dalam RPJMD namun dianggap penting untuk dilaksanakan mengingat dokumen RKPD Tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012-2016. Adapun program tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2.3 berikut ini.

Tabel 4.2.3

Program Pembangunan Daerah

Yang Tidak Tercantum Dalam RPJMD 2012-2016

No	Bidang Urusan	Program Pembangunan	SKPD	Keterangan
1.	Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Pengendalian, Pengujian, dan Standarisasi Profisiensi IAB, UPTD PSDA-PM	Dinas Pekerjaan Umum & Perumyat	Mendukung Prioritas Pembangunan : Infrastruktur
2.		Program Pembinaan Pengembangan dan Kerjasama Pengawasan	Dinas Pekerjaan Umum &	Mendukung Prioritas Pembangunan

		Uji Mutu Konstruksi	Perumyat	: Infrastruktur
3.		Program Studi dan Identifikasi Pengujian Stimulan Bahan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum & Perumyat	Mendukung Prioritas Pembangunan : Infrastruktur
4.	Pemerintahan Umum	Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah	Sekretariat Daerah Biro Keuangan	Mendukung Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi
5.		Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Sekretariat Daerah Biro Keuangan	Mendukung Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi
6.		Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah	Sekretariat Daerah Biro Keuangan	Mendukung Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi
7.		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sekretariat Daerah Biro Keuangan	Mendukung Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi
8.		Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah Biro Keuangan	Mendukung Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi

Dari hasil identifikasi tersebut, Program Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat dilihat penjelasannya sebagaimana pada Tabel 4.2.4 dibawah ini.

Tabel 4.2.4

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		Pendidikan			
1	Pendidikan	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	% Satuan Pendidikan menerapkan MBS	40,46%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	% Guru memenuhi Standar Kualifikasi S1/DIV	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3		**Program Pendidikan Luar Biasa**	APK SDLB/SMPLB	93,05%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4		**Program Pendidikan Non Formal**	Angka Melek Huruf	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5		**Program Pendidikan Menengah**	APK SMA/SMALB/MA/ SMK/Paket C	83,17%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	APM SD/SDLB/MI	97,65%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	APK PAUD	65,81%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8		**Prgram Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan**	Persentase Sekolah memanfaatkan TIK dalam Proses Pembelajaran	51,67%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

9		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Meningkatnya Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	4140 Kunj.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
		Kesehatan			
10	Kesehatan	**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	Meningkatkan Mutu Pelayanan	100%	RSU REGIONAL
11		**Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	Terpeliharanya Sarana RS	100%	RSU REGIONAL
12		**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perawatan dan Penunjang Medik (Alat Kesehatan, Obat-obatan, Logistik Rumah Sakit, Bahan Alat Pembersih, alat Rumah Tangga Rumah Sakit)	100%	RSU REGIONAL
13		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	- Persentase Rumah Tangga berPHBS - Persentase Desa Siaga Aktif	- 80% - 70%	RSU REGIONAL
14		**Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan**	Persentase Provinsi dan Kabupaten memiliki Bank Data Kesehatan	100%	DINAS KESEHATAN
15		**Program Pelayanan Kesehatan Perorangan**	Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	52%	DINAS KESEHATAN

16		**Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan**	Tersedianya Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dibutuhkan oleh Masyarakat Sulbar	100%	DINAS KESEHATAN
17		**Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan**	Persentase Tenaga Kesehatan yang lulus uji kompetensi berizin	70%	DINAS KESEHATAN
18		**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	70%	DINAS KESEHATAN
19		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	- Persentase RS yang terakreditasi - Persentase RS Provinsi/Kab yang menerapkan SPM RS	- 23% - 60%	DINAS KESEHATAN
20		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	- Angka Penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk - Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan - Persentase Desa yang mencapai UCI	- 20% - 90% - 100%	DINAS KESEHATAN
21		**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	80%	DINAS KESEHATAN

22		**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	- Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) - Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	- 88% - 100%	DINAS KESEHATAN
23		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	- Persentase Rumah Tangga berPHBS - Persentase Desa Siaga Aktif	- 80% - 70%	DINAS KESEHATAN
24		**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	100%	DINAS KESEHATAN
25		**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Puskesmas menjadi Puskemas Perawatan	55%	DINAS KESEHATAN
26		**Program Obat dan Pembekalan Kesehatan**	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	100%	DINAS KESEHATAN
		Pekerjaan Umum			
27	Reformasi Birokrasi	**Program Penyelenggaraan Pengendalian, Pengujian dan Standarisasi Profisiensi IAB. UPTD PSDA-PM**			DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
28		**Program Pembinaan Pengembangan dan Kerjasama Pengawasan Uji Mutu Konstrusi**			DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
29		**Program Studi dan Identifikasi Pengujian Stimulan Bahan Bangunan**			DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT

30	Infrastruktur	**Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkantoran**	Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Gedung dan Rumah Negara	26%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
31		**Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan**			DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
32		**Program pengendalian banjir**	Terjaminnya Rasa Aman Masyarakat dari Ancaman Banjir dan Abrasi Pantai	42%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
33		**Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	Terbangunnya Pengelolaan dan Konversi Sungai, Dana dan Sumber Daya Air Lainnya	25%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
34		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	Terbukanya/TerbangunnyaDaerah Irigasi Baru	25%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
35		**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	Memperlancar Aksebilitas Antar Kawasan	17%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
36		**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	Memperlancar Aksebilitas Antar Kawasan	22%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Perumahan Rakyat			
37		**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan	26%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT

			Pengembangan Sanitasi dan Persampahan		
		Penataan Ruang			
38		**Program Perencanaan Tata Ruang**	Tersedianya Dokumen RTRW	1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
39		**Program Perencanaan Tata Ruang**		19%	DINAS PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Perencanaan Pembangunan			
40	Reformasi Birokrasi	**Program Pengembangan data/informasi**	Tersedianya data dalam bentuk elektronik dan dokumen print out	30 Dok, 3 Elektronik data	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
41		**Program perencanaan pembangunan daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan yang akurat	20 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
42		**Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah**	Terciptanya Perencanaan Program Pembangunan yang terukur dan terarah	2 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

43		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	50 Orang, 1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
44	Infrastruktur	**Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar**	Terwujudnya tata kota yang berbasis lingkungan	1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
45		**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh**	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
46		**Program Kerjasama Pembangunan**	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam menunjang pembangunan daerah	25 Kali kunjungan per 4 Orang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
47		**Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana**	Tersedianya dokumen pembangunan daerah rawan bencana	1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
48		**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	Tersedianya dokumen prasarana wilayah dan pengembangan sumber daya alam	5 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

49	Agroindustri	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	Tersusunnya dokumen perencanaan yang akurat	1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
50	Bangun Mandar	**Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	1 Dok	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Perhubungan			
51	Infrastruktur	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	65%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
52		**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	Meningkatnya keselamatan LLAJ	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
53		**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	Tersedianya prasarana dan dokumenperubungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi	95%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
54	Bangun Mandar	**Program Peningkatan dan Pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi**	Terlaksananya peningkatan dan pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
55		**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	Meningkatnya keselamatan di jalan	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

					INFORMATIKA
56		**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	Tersedianya prasarana jalan (Rambu, APIL, Pagar Pengamanan Jalan, marka, dll)	85%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
57		**Program peningkatan pelayanan angkutan**	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Lingkungan Hidup			
58	Reformasi Birokrasi	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	Memastikan peningkatan kualitas data dan informasi kualitas SDA dan LH sebagai dasar perencanaan pembangunan	Dokumen PDRB Hijau	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
59		**Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup**	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup dan PPLH & PPNS	1 SLHD, 1 IKLH, SPM, 4 sekolah calon adiwiyata	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
60	Kesehatan	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Menurunnya beban pencemaran limbah domestik	Piagam/Sertifikat Adipura	BADAN LINGKUNGAN HIDUP

61		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Meningkatkan pengawasan ketaatan pengendalian usaha.kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta menurunnya beban pencemaran lingkungan pada air, udara dan B3		BADAN LINGKUNGAN HIDUP
62	Infrastruktur	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	Meningkatkan jumlah tutupan lahan dan penekanan laju deforestasi melalui peningkatan pengendalian kerusakan hutan, konservasi dan pengelolaan kehati sulbar		BADAN LINGKUNGAN HIDUP
		Pertanahan			
63	Reformasi Birokrasi	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan	25%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN
		Kependudukan dan Catatan Sipil			
64		**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Terlaksananya peningkatan kualitas Aparatur penata Adm. Kependudukan	100%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

65		**Program Pengumpulan data dan informasi**	Tersedianya data base terpilah tentang gender dan anak untuk kepentingan perencanaan	1 Dok	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
66	Kesehatan	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak**	Meningkatnya kesadaran atas peran perlindungan perempuan dan perlindungan anak	1 Produk Hukum	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
67		**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan	120 Orang	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
68		**Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan PUHA melalui upaya pembentukan Pokja diantara sektor instansi terkait	10 Lembaga Perempua, 8 Lembaga Anak	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69	Bangun Mandar	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	Terserapnya perempuan dalam berbagai lapangan pekerjaan serta partisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan maupundalam menikmati hasil pembangunan	83%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			

70	Kesehatan	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	Meningkatnya kualitas reproduksi remaja	360 Orang	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sosial			
71	Reformasi Birokrasi	**Program Perlindungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran**	Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerjamigran yang tertangani	70 Orang	DINAS SOSIAL
72	Pendidikan	**Program pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial**	Meningkatnya pelestarian Nilai kepahlawanan, keperintisan dn kesetiakawanan sosial	5 Keg	DINAS SOSIAL
73		**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	100 Orang	DINAS SOSIAL
74		**Program pembinaan anak terlantar**	Jumlah dan persentase anak terlantar dan Panti Asuhanyang diberikan bantuan	5 Keg	DINAS SOSIAL
75	Kesehatan	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan pembinaan, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial	50 Orang	DINAS SOSIAL
76		**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	Jumlah Orang dengan Kecacatan (ODK) yang mendapat pelayanan Pembinaan dan Perlindungan	150 Orang	DINAS SOSIAL

77	Bangun Mandar	**Program Pengembangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**	Terlaksananya Bimtek/Pendataan PMKS, INDOTERA (Indonesia Sejahtera), Pengembangan SDM Kesos dan Koordinasi Bidang Kesos	8 Keg	DINAS SOSIAL
78		**Program pemberdayaan keluarga**	Tersedianya bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga rentan	250 KK	DINAS SOSIAL
79		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Terberdayakannya Organisasi Kelembagaan Sosial, TKSK dan PSM	20 Lembaga	DINAS SOSIAL
80		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Tersedianya pemukiman dan infrastruktur bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	75 Unit	DINAS SOSIAL
81		**Program Penanggulangan musibah bencana alam/bencana sosial**	Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani	3 Keg	DINAS SOSIAL
		Ketenagakerjaan			
82		**Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Penerapan Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	3 Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

83		**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	Meningaktnya peran LKS biparlit dan triparlit dalam pengembangan lembaga ketenagakerjaan	100 LKS Biparlit, 1 LKS Triparlit	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
84		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	Terdayaninya penempatan tenaga kerja dengan penempatan yang tepat	840 Orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
85		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkompetensi di bidangnya	1350 Orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
86	Agroindustri	**Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi UKM**	Berkembangnya dan bertambahnya koperasi aktif	5 Unit	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
87		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi	90%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
88		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	Percepatan perkembangan usaha KUKM	1 Keg Expo	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
89		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Berkembangnya UKM yang memiliki daya saing dan produktivitas		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

90		**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	Terciptanya iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif dalam rangka pertumbuhan UKM	90%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		Penanaman Modal			
91		**Program peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis BKPMD & P2T**	Tersedianya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis	1 Paket	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU
92		**Program kualitas pelayanan publik**	Tersedianya sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang maksimal untuk menunjang peningkatan publik	1 Paket	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU
93		**Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah**	Tersedianya data potensi daerah yang dibutuhkan oleh investor	3 Dok	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU
94		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	7,1 T	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU
95		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	59 Investor	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU

		Kebudayaan			
96	Pendidikan	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**		25 Fasilitas Pariwisata	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
97		**Program Pengembangan Nilai Budaya**	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan potensial daerah	25 Fasilitas Pariwisata	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Kepemudaan dan Olahraga			
98		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**		10x Pelatihan	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
99		**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Terciptanya SDM pemuda yang berkualitas	20%	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
100		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**		10x Pelatihan	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
101	Infrastruktur	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	Tersedianya saran dan prasarana olahraga di 5 kabupaten	9 fasilitas olahraga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
102	Bangun Mandar	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**		1 paket	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
103	Reformasi Birokrasi	**Program penngkatan kesadaran berbangsa dan bernegara**	Terlaksananya peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara		BADAN KESBANG DAN POLITIK
104		**Program pengembangan**	Terkembangnya wawasan	30 Orang	BADAN KESBANG DAN

		wawasan kebangsaan	kebangsaan		POLITIK
105		**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		BADAN KESBANG DAN POLITIK
106		**Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan Ormas**	Terlaksananya program peningkatan kapasitas fungsi dan keberadaan Ormas	5 Kabupaten	BADAN KESBANG DAN POLITIK
107		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Terkembangnya wawasan kebangsaan	30 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS
108	Infrastruktur	**Program peningkatan kesiapsiagaan dan logistik bencana**	Terlaksananya kesiapsiagaan/kedaruratan dan logistik bencana	30%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
109		**Program pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana**		20%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
110		**Program pemulihan pasca bencana**		20%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
111	Agroindustri	**Program fasilitas politik dalam negeri**	Terfasilitasinya program pendidikan politik dalam negeri	30 Orang	BADAN KESBANG DAN POLITIK
112		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	50 Orang	BADAN KESBANG DAN POLITIK
113		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan**	Terlaksananya peningkatan keamanan dan	50 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & LINMAS

		lingkungan	kenyamanan lingkungan		
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
114	Reformasi Birokrasi	**Program peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**	Opini BPK	WTP	INSPEKTORAT DAERAH
115		**Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa**		1 paket	INSPEKTORAT DAERAH
116		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah**	Meningkatnya kualitas dan capaian kinerja LPPD Provinsi Sulawesi Barat	100%	INSPEKTORAT DAERAH
117		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	Terlaksananya tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	28 LHP	INSPEKTORAT DAERAH
118		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PerUU Pusat & Daerah	39%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
119		**Program Penanganan Bantuan Hukum dan HAM**	Terlaksananya penegakan kuasa hukum & gelar perkara peradilan	29%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
120		**Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**	CD Produk hukum daerah provinsi & kabupaten se-Sulawesi Barat	24%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

121		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	Tersedianya saran dan prasarana dalam rangka pengembangan persandian & teknologi informasi	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
122		**Program peningkatan pelayanan kehumasan**	Meningkatkan pelayanan kehumasan	100%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUMAS PROTOKOL
123		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	Tersedianya saran dan prasarana dalam rangka pengembangan persandian & teknologi informasi	90%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUMAS PROTOKOL
124		**Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa**		1 paket	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUMAS PROTOKOL
125		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah	20%	DINAS PENDAPATAN DAERAH
126		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	Mennigkatnya kesadaran masyarakat tentang pemenuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Perda	DINAS PENDAPATAN DAERAH
127		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**	Pengelolaan keuangan daeah dengan predikat	WTP	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN
128		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Pengelolaan keuangan daeah dengan predikat	WTP	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN

129		**Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah**			SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN
130		**Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah**			SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN
131		**Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah**			SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN
132		**Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**			SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN
133		**Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah**			SEKRETARIAT DAERAH BIRO KEUANGAN
134		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah**	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pembangunan daerah	24%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIA N DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
135		**Program peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah provinsi sulawesi barat**	Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan pemprov sulbar		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
136		**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
137		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah**	Meningkatnya kualitas dan capaian kinerja LPPD Provinsi Sulawesi Barat		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN

138		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**		20%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN
139		**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	Terlaksananya kerjasama antar daerah	20%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN
140		**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	Terlaksananya penataan daerah otonomi baru	20%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN
141		**Program pengembangan kapasitasn dan evaluasi kinerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal**	Terlaksananya pelayanan dasar masyarakat	20%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN
142		**Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama**	Meningkatnya iman dan taqwa	20%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESRA
143		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa	100%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
144		**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat yang intensif	100%	SEKRETARIAT DPRD
145		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terimplementasinya pengelolaan keuangan daerah yang profesional	100%	SEKRETARIAT DPRD
146		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	Meningkatnya Tugas, Fungsi dan wewenang DPRD	100%	SEKRETARIAT DPRD
147		**Program Peningkatan Kerjasama Antar**	Meningkatnya hubungan	100%	SEKRETARIAT DPRD

		Pemerintah Daerah	kerjasama antar pemerintah daerah		
148		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	Tersusunnya peraturan perundang-undangan	100%	SEKRETARIAT DPRD
149		**Program peningkatan pelayanan kehumasan**	Meningkatnya pelayanan kehumasan	100%	SEKRETARIAT DPRD
150	Agroindustri	**Program penguatan ekonomi daerah**	Meningkatnya penguatan ekonomi daerah	19%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
151		**Program peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan**	Tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat	25%	SEKRETARIAT DAERAH BIRO KESRA
		Kepegawaian			
152	Reformasi Birokrasi	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
153		**Program Pembinaan peningkatan keagamaan**		1 paket	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
154		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Terbinanya dan berkembangnya kemampuan serta pengetahuan dalam upaya peningkatan karier aparat	20% kenaikan dari tahun ke-4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

155	Bangun Mandar	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang akuntabel dan profesional	69 desa	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMDES
156		**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat baik berupa pikiran tenaga dan financial dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya	69 desa	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMDES
157		**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dalam memberdayakan usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan	100 kelompok	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMDES
158		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan di perdesaan	69 desa	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMDES
		Kearsipan			
159	Reformasi Birokrasi	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**	Peningkatan penerbitan naskah sumber arsip	3 daftar arsip SKPD	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
160		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	8 SKPD	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

		Komunikasi dan Informatika			
161		**Program peningkatan komunikasi informasi serta penggunaan media mssa**	Meningkatnya komunikasi & pelayanan informnasi serta profesionalisme aparat kehumasan dengan mitra kerja kehumasan	98%	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
162		**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**	Meningkatnya SDM pada bidang komunikasi dan informasi	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
163	Bangun Mandar	**Program Kerjasama Informsi dan Media Massa**	Meningkatnya kerjasama informasi	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
164		**Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi**	Meningkatnya kualitas penelitian untuk pengembangan kualitas informasi	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
165		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Meningkatnya kualitas penyebaran informasi dan komunikasi	90%	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Pertanian			
166	Ketahanan Pangan	**Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan**	Meningkatnya ketahanan pangan	100%	BADAN KETAHANAN PANGAN
167		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesejahteraan Petani	32%	BADAN KETAHANAN PANGAN
168		**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan**	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan,	20%	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,

			kehutanan lapangan		PERIKANAN DAN KEHUTANAN
169		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesejahteraan Petani	20%	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
170		**Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian**	Meningkatnya nilai tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan pemasaran hasil pertanian	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
171		**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	Meningkatnya produksi hasil peternakan	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
172		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
173		**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
174		**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**	Meningkatnya penerapan teknologi Pertanian/perkebunan	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
175		**Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan**	Meningkatnya ketahanan pangan	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
176		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesejahteraan petani-SDM	100%	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

177		**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Produksi 5 komoditi unggulan 304.551 ton	DINAS PERKEBUNAN
178		**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	Tersedianya informasi tentang Produk Unggulan Daerah	Pameran 4 kali	DINAS PERKEBUNAN
179		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Meningkatnya kesejahteraan petani	Jumlah petani 255.996 KK dengan luas areal 357.240 Ha	DINAS PERKEBUNAN
		Kehutanan			
180	Reformasi Birokrasi	**Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan**	Terwujudnya perencanaan makro dan pemantapan tata batas serta pengelolaan kawasan hutan	Perencanaan dan pengelolaan data tercapai 90%, pemeliharaan batas kawasan hutanbisa meningkat 15%, dan KPH sudah optimal melaksanakan tugasnya	DINAS KEHUTANAN

181	Infrastruktur	**Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan**	Terwujudnya tertib pengamanan hutan, tertanggulanginya kebakaran hutan dan meningkatnya kawasan konservasi	Berukurangnya perambahan hutan dan illegal logging, terbangunnya hutan kota di semua kabupaten, serta terpeliharanya kawasan konservasi yang telah ada	DINAS KEHUTANAN
182		**Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**	Tersusunnya perencanaan dan pengembangan hutan dengan baik	Perencanaan bisa lebih baik sampai 77%	DINAS KEHUTANAN
183		**Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat**	Terlaksananya rehabilitasi hutan baik di dalam maupun di luar kawasan dan meningkatnya pengembangan aneka usaha kehutanan dan HHBK lainnya	Luas areal yang direhabilitasi 18%, pengembangan aneka usaha kehutanan/HHBK di semua kabupaten dan HKm maupun hutan desaberkembang	DINAS KEHUTANAN

184	Agroindustri	**Program peningkatan usaha kehutanan**	Terlaksananya peningkatan usaha di bidang kehutanan	Produk kehutanan kayu dan industri kayu maupun non kayu meningkat, jumlah ijin pengelolaan hutan tanaman meningkat, dan peredaran HH lebih tertib	DINAS KEHUTANAN
		Energi dan Sumber Daya Mineral			
185	Reformasi Birokrasi	**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**	Terciptanya pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
186		**Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan**	Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
187		**Program Pengembangan dan Monitoring Bidang Minyak dan Gas Bumi**	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dan masyarakat di bidang minyak dan gas bumi	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
188	Infrastruktur	**Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**	Meningkatnya pelayanan dan pembinaan kelistrikan kepada	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

			masyarakat		
189		**Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan**	Pengembangan energi baru terbarukan menuju energi terbarukan	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
190		**Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral**	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang sumber daya alam	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
191		**Survey dan Pemetaan Sumber Daya Geologi, Tata Lingkungan, Mineral dan Batubara**	Tersedianya data dan informasi sumber daya geologi dan tata lingkungan, mineral dan batu bara	98%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Pariwisata			
192	Destinasi Wisata	**Program Pengembangan Kemitraan**	Tersedianya SDM di bidang pariwisata yang kreatif dan mandiri	96 Orang	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
193		**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Meningkatnya kunjungan wisata	100%	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
194		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	Tersedianya objek wisata yang dipromosikan untuk tujuan wisatawan	100%	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Kelautan dan Perikanan			
195	Reformasi Birokrasi	**Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	200 Orang	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
196	Bangun Mandar	**Program Pemberdayaan**	Meningkatnya kesejahteraan	100 kelompok	DINAS KELAUTAN DAN

		Ekonomi Masyarakat Pesisir	masyarakat pesisir		PERIKANAN
197	Ketahanan Pangan	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	Terlaksananya kajian/riset/pengumpulan data tentang optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	2 Laporan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
198		**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap	90.058 ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
199		**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya	94.687 ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Perdagangan			
200	Agroindustri	**Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**	Terbinanya pedagang kaki lima & asongan	50 pedagang & 5 kabupaten	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
201		**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**	Meningkatnya volume perdagangan dalam negeri	1 kegiatan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
202		**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	Meningkatnya perdagangan ekspor	100%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
203		**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional**	Meningkatnya kerjasama perdagangan internasional	30 Orang & 1 Laporan database	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

					UKM
204		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	17,50%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		Industri			
205		**Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**	Berkembangnya produk sentra IKM	3 kali expo	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
206		**Program Penataan Struktur Industri**	Tertatanya keterkaitan industri hulu-hilir	2 kegiatan	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
207		**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	Meningkatnya kontribusi sektor industri pada PDRB	10%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
208		**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	Meningkatnya kuantitas dan kualitas IKM	19%	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		Ketransmigrasian			
209		**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	Terwujudnya pengembangan pembangunan pemukiman transmigrasi di 5	11 UPT	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

			kabupaten di Sulawesi Barat		
210		**Program Transmigrasi Lokal**	Terwujudnya penempatan dan pembinaan warga transmigrasi dan sekitar kawasan transmigrasi menuju Desa Mandiri	720 Orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI